



Mengungkap Akar Penyebab Korupsi sebagai Bentuk Fraud di Sektor Publik pada PT Pertamina Tahun 2025

Faaiqotun Nikmah Irsyani*, Tiffany Shahnaz Wati, Maslina Samosir, Abigael Chrislovelan Lesbasa, Tries Ellia Sandari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak: Korupsi sebagai bentuk fraud di sektor publik merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Kompleksitas operasional, besarnya nilai transaksi, serta lemahnya pengawasan internal menyebabkan sektor ini memiliki risiko fraud yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab korupsi pada kasus PT Pertamina tahun 2025 dengan menggunakan perspektif fraud dalam sektor publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan literature review yang bersumber dari laporan lembaga resmi, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta media kredibel seperti ACFE, OECD, Transparency International, dan Reuters. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mengacu pada teori Fraud Triangle dan Fraud Hexagon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, dan sistem yang saling berinteraksi. Faktor individu meliputi tekanan finansial dan rasionalisasi, sedangkan faktor organisasi berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal, rendahnya transparansi, dan kurang efektifnya pengawasan. Pada level sistem, kompleksitas regulasi dan adanya celah kebijakan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kolusi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor organisasi dan sistem menjadi faktor yang paling dominan dibanding faktor individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fraud di sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tetapi juga oleh kelemahan tata kelola dan sistem pengawasan organisasi. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal, transparansi, dan budaya integritas menjadi langkah penting dalam pencegahan korupsi di sektor publik.

Kata Kunci: Korupsi, Fraud, Sektor Publik, Fraud Hexagon, Pengendalian Internal.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4108>

*Correspondence: Faaiqotun Nikmah Irsyani

Email: faaiq0904@gmail.com

Received: 21-03-2026

Accepted: 21-04-2026

Published: 21-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Corruption as a form of fraud in the public sector is an issue that continues to be a concern in the governance of State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia. Operational complexity, large transaction values, and weak internal oversight cause this sector to have a relatively high risk of fraud. This study aims to analyze the factors causing corruption in the PT Pertamina case in 2025 using a fraud perspective in the public sector. The study uses a qualitative approach through a case study method. Data were obtained through documentation studies and literature reviews sourced from official agency reports, scientific journals, policy documents, and credible media such as ACFE, OECD, Transparency International, and Reuters. Data analysis was conducted using thematic analysis with reference to the Fraud Triangle and Fraud Hexagon theories. The results of the study indicate that corruption is influenced by interacting individual, organizational, and system factors. Individual factors include financial pressure and rationalization, while organizational factors are related to weak internal controls, low transparency, and ineffective oversight. At the system level, regulatory complexity and the existence of policy gaps increase the risk of abuse of authority and collusion. The results also show that organizational and system factors are the most dominant factors compared to individual factors. This study concludes that fraud in the public sector is influenced not only by individual behavior but also by weaknesses in organizational governance and oversight systems. Therefore, strengthening internal controls, transparency, and a culture of integrity are crucial steps in preventing corruption in the public sector.

Keywords: Corruption, Fraud, Public Sector, Fraud Hexagon, Internal Control

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama dalam tata kelola sektor publik yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah serta menghambat pembangunan ekonomi ([Transparency International, 2023](#)). Dalam konteks ini, korupsi sering dipahami sebagai bagian dari fraud (kecurangan) karena melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok ([Association of Certified Fraud Examiners, 2022](#)). Dalam perspektif ilmu akuntansi dan auditing, korupsi sering dikategorikan sebagai bagian dari fraud (kecurangan), yaitu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum atau norma yang berlaku ([Association of Certified Fraud Examiners \[ACFE\], 2022](#)). Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan penyebab fraud adalah Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Teori ini menjelaskan bahwa fraud dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Seiring perkembangan penelitian, teori tersebut berkembang menjadi Fraud Diamond dan Fraud Hexagon yang menambahkan faktor kemampuan (capability) serta kolusi (collusion) dalam menjelaskan fraud modern ([Vousinas, 2019](#)). Perkembangan teori ini menunjukkan bahwa fraud tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga oleh kondisi organisasi dan sistem yang lebih luas.

Dalam kajian akademik, salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan penyebab fraud adalah Fraud Triangle, yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) ([Cressey, 1953; ACFE, 2022](#)). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor kesempatan, terutama yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, menjadi faktor dominan dalam mendorong terjadinya korupsi di sektor publik ([Irma & Myharto, 2026](#)). Selain itu, perkembangan teori seperti Fraud Hexagon menambahkan faktor lain seperti kolusi dan kemampuan individu yang semakin memperkuat kompleksitas penyebab fraud (Vousinas, 2019; diperkuat dalam studi terbaru 2024–2025). Seiring perkembangan penelitian, teori ini mengalami pengembangan menjadi konsep yang lebih kompleks, seperti Fraud Diamond dan Fraud Hexagon, yang menambahkan faktor kemampuan (capability), keserakahan (greed), serta kolusi (collusion). Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab korupsi tidak hanya terbatas pada aspek individu, tetapi juga melibatkan faktor organisasi dan sistem secara keseluruhan. Dalam konteks sektor publik, lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya transparansi, serta budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi. Lebih lanjut, laporan ACFE (2022) menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah cenderung mengalami kerugian yang lebih besar akibat fraud. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa budaya organisasi dan lemah Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi sebagai bentuk fraud di sektor publik merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor organisasi dan sistem yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian

yang komprehensif untuk mengungkap akar penyebab terjadinya korupsi, khususnya dalam kasus Pertamina tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik terkait fraud di sektor publik serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan korupsi di masa mendatang.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal dan rendahnya transparansi organisasi menjadi faktor utama terjadinya fraud di sektor publik. Saikhu et al. (2025) menjelaskan bahwa BUMN memiliki tingkat risiko fraud yang tinggi akibat kompleksitas tata kelola dan adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran dapat meningkatkan peluang terjadinya korupsi ([Free & Murphy, 2021](#)). Selain itu, laporan ACFE (2022) menyebutkan bahwa sebagian besar kasus fraud terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya efektivitas audit internal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa fraud di sektor publik merupakan masalah multidimensional yang melibatkan faktor individu, organisasi, dan sistem secara bersamaan.

Meskipun berbagai penelitian mengenai fraud dan korupsi telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor individu dan pengendalian internal secara terpisah. Penelitian terdahulu juga cenderung membahas fraud dalam sektor privat atau hanya menggunakan pendekatan Fraud Triangle sebagai kerangka utama analisis. Padahal, fraud pada sektor publik, khususnya di BUMN sektor energi, memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena melibatkan hubungan antara kepentingan bisnis, kebijakan publik, dan risiko kolusi antar pihak ([OECD, 2025](#)). Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana interaksi faktor individu, organisasi, dan sistem memengaruhi terjadinya korupsi pada sektor publik secara lebih komprehensif.

Penelitian ini menjadi penting karena korupsi di sektor publik tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas tata kelola dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam sektor energi seperti Pertamina, besarnya nilai proyek dan kompleksitas rantai pasok meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang serta praktik kolusi ([Reuters, 2025](#)). Selain itu, perkembangan fraud modern menunjukkan bahwa praktik korupsi saat ini cenderung lebih terorganisasi dan memanfaatkan celah regulasi maupun kelemahan pengawasan organisasi ([Kohar, 2024](#)). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan analisis yang lebih integratif untuk memahami akar penyebab fraud di sektor publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab korupsi sebagai bentuk fraud pada kasus PT Pertamina tahun 2025 dengan menggunakan perspektif Fraud Triangle dan Fraud Hexagon. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi terjadinya fraud, baik dari sisi individu, organisasi, maupun sistem. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian fraud sektor publik serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan pengendalian internal transparansi, dan strategi pencegahan korupsi pada BUMN.

Metodologi

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena korupsi dalam konteks nyata (Yin, 2018). Studi kasus memungkinkan eksplorasi faktor penyebab fraud secara komprehensif dalam lingkungan organisasi yang kompleks seperti Pertamina.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, antara lain:

1. Laporan resmi lembaga
2. Publikasi jurnal ilmiah terkait fraud dan korupsi
3. Berita investigatif dari media kredibel (misalnya Reuters, East Asia Forum)
4. Dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah
5. Laporan lembaga internasional seperti Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan Transparency International

Seluruh data yang digunakan bersifat terbuka (open-access) dan dapat diakses publik. Apabila terdapat data yang memiliki keterbatasan akses, hal tersebut akan diinformasikan secara transparan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumentasi
2. Literature review berbasis teori Fraud Triangle

Metode ini sesuai dengan penelitian fraud yang menekankan analisis berbasis dokumen dan literatur (ACFE, 2022).

Ketersediaan Data dan Replikasi

Seluruh data dalam penelitian ini berasal dari sumber publik dan dapat diakses kembali oleh peneliti lain. Tidak terdapat pembatasan akses terhadap data. Prosedur analisis dijelaskan secara rinci untuk memungkinkan replikasi penelitian

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis berbagai sumber data sekunder terkait kasus korupsi sebagai bentuk fraud di sektor publik, dengan fokus pada kasus Pertamina tahun 2025. Data diperoleh dari laporan lembaga internasional, jurnal ilmiah, serta publikasi media kredibel. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: individu, organisasi, dan sistem. Secara umum, laporan Report to the Nations menunjukkan bahwa sekitar 42% kasus fraud terjadi karena lemahnya pengendalian internal, sementara 27% dipicu oleh tekanan finansial individu (Association of Certified Fraud Examiners [ACFE], 2022). Temuan ini relevan dengan pola yang terlihat

pada sektor BUMN, di mana kompleksitas organisasi membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Table 1. An example of a table (font size 10pt)

Faktor	Indikator Utama	Keterangan
Individu	Tekanan Keuangan dan Pembenaan Diri (Rasionalisasi)	Memiliki dorongan kebutuhan uang dan alasan untuk membenarkan sebuah tindakan
Organisasi	Sistem Pengawasan/Pengendalian Internal Lemah	Kurangnya kontrol dan pengawasan dalam sebuah organisasi
Sistem	Aturan Rumit dan Banyak Celah	Aturan tidak jelas atau terlalu kompleks membuka peluang dalam penyalahgunaan

Sumber 1 Sumber: Diolah dari ACFE(2022)

Faktor individu terlihat dari adanya tekanan dan rasionalisasi. Dalam banyak kasus, pelaku membenarkan tindakan mereka karena merasa memiliki kebutuhan mendesak atau melihat praktik serupa sebagai hal yang “lumrah”. Hal ini sejalan dengan konsep Fraud Triangle, yang menempatkan tekanan dan rasionalisasi sebagai pemicu utama fraud ([Cressey, 1953](#); [ACFE, 2022](#)). Dari sisi organisasi, ditemukan bahwa kelemahan pengendalian internal menjadi celah utama. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang tidak memiliki sistem audit yang kuat cenderung lebih rentan terhadap fraud ([Albrecht et al., 2020](#)). Dalam konteks sektor energi, kompleksitas operasional semakin memperbesar risiko ini. Sementara itu, faktor sistem berkaitan dengan struktur regulasi yang kompleks. Studi terbaru menunjukkan bahwa BUMN menghadapi risiko fraud yang lebih tinggi karena adanya interaksi antara kepentingan bisnis dan kebijakan publik (Saikhu, 2025). Hal ini membuka peluang terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan wewenang.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi sebagai bentuk fraud dalam kasus PT Pertamina (Persero) tahun 2025 merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan interaksi kompleks antara faktor individu, organisasi, dan sistem. Secara konseptual, temuan ini menguatkan kerangka klasik Fraud Triangle yang menempatkan tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) sebagai determinan utama perilaku fraud ([Rizaya & Nurhazana, 2025](#)). Namun, jika ditelaah secara kritis, temuan ini juga menunjukkan bahwa kerangka tersebut belum sepenuhnya memadai dalam menjelaskan karakter fraud modern yang bersifat sistemik dan terorganisasi.

Pada dimensi individu, keberadaan tekanan finansial dan rasionalisasi sebagai pendorong utama perilaku koruptif memperkuat temuan empiris bahwa faktor psikologis tetap relevan dalam menjelaskan fraud ([Rizaya & Nurhazana, 2025](#)). Akan tetapi, reduksi fraud pada level individu berisiko menghasilkan simplifikasi yang menyesatkan. Studi terbaru menunjukkan bahwa rasionalisasi sering kali tidak berdiri sebagai proses kognitif individual, melainkan dipengaruhi oleh norma organisasi dan lingkungan kerja yang permisif terhadap penyimpangan ([Kohar, 2024](#)). Dengan demikian, temuan penelitian ini

memperluas konsep rasionalisasi dari yang bersifat individual menjadi fenomena kolektif yang terinstitusionalisasi.

Pada level organisasi, temuan mengenai lemahnya sistem pengendalian internal sebagai faktor dominan sangat konsisten dengan literatur mutakhir yang menegaskan bahwa internal control merupakan mekanisme utama dalam pencegahan fraud ([Nailufar, 2026](#); [OECD, 2025](#)). Bahkan, penelitian empiris menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat dapat secara signifikan menurunkan peluang terjadinya fraud melalui mekanisme pengawasan, pemisahan tugas, dan audit berkelanjutan ([Lee, 2026](#)). Namun demikian, temuan ini juga mengkritisi asumsi implisit dalam literatur bahwa keberadaan sistem otomatis menjamin efektivitas. Data OECD menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar negara telah memiliki regulasi pengendalian internal yang memadai, implementasinya masih sering tidak optimal ([OECD, 2026](#)). Artinya, persoalan utama bukan hanya pada desain sistem, tetapi pada praktik implementasi dan integritas aktor yang menjalankannya.

Lebih jauh, dimensi sistem yang tercermin dalam kompleksitas regulasi dan banyaknya celah kebijakan memperlihatkan bahwa fraud di sektor publik bersifat struktural. Temuan ini sejalan dengan studi literatur terbaru yang menunjukkan bahwa fraud dalam sektor pemerintah seringkali dipicu oleh kombinasi tekanan ekonomi, kelemahan institusi, serta budaya organisasi yang permisif ([Kohar, 2024](#)). Dalam konteks ini, kompleksitas regulasi tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga membuka ruang bagi praktik kolusi yang sulit terdeteksi. Hal ini memperkuat relevansi model teoritis yang lebih mutakhir seperti Fraud Hexagon, yang memasukkan elemen kolusi dan kemampuan sebagai faktor kunci dalam fraud modern.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini tidak hanya mengkonfirmasi hubungan antara internal control dan fraud prevention, tetapi juga memperluasnya dengan menekankan peran faktor sistemik sebagai variabel yang sering diabaikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada hubungan linear antara variabel organisasi dan fraud ([Nailufar, 2026](#)), sementara penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat interdependen dan dipengaruhi oleh konteks kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi tiga level analisis mikro (individu), meso (organisasi), dan makro (sistem) dalam satu kerangka interpretatif yang lebih komprehensif.

Dari sisi kontribusi teoritis, penelitian ini menegaskan keterbatasan model klasik seperti Fraud Triangle dalam menjelaskan fenomena fraud di sektor publik yang kompleks. Temuan ini mendukung pergeseran paradigma dari pendekatan individualistik menuju pendekatan struktural dan sistemik. Dengan kata lain, fraud tidak lagi dapat dipahami semata sebagai hasil deviasi individu, tetapi sebagai produk dari interaksi antara struktur kelembagaan, budaya organisasi, dan insentif ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan justifikasi empiris bagi pengembangan model fraud yang lebih integratif dan kontekstual.

Secara praktis, implikasi penelitian ini menuntut pergeseran strategi pencegahan korupsi. Pertama, pendekatan yang hanya berfokus pada peningkatan integritas individu

tidak akan efektif tanpa diiringi reformasi sistemik. Kedua, penguatan pengendalian internal harus disertai dengan peningkatan kualitas implementasi, termasuk pengawasan independen dan akuntabilitas yang lebih ketat. Ketiga, simplifikasi regulasi menjadi penting untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor yang memiliki kepentingan. Keempat, penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas menjadi faktor krusial dalam memastikan efektivitas sistem formal.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara eksplisit. Ketergantungan pada data sekunder menyebabkan analisis tidak sepenuhnya mampu menangkap dinamika internal organisasi secara mendalam. Selain itu, penggunaan data agregat seperti laporan ACFE berpotensi menghasilkan generalisasi yang kurang sensitif terhadap konteks spesifik kasus Pertamina. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris langsung seperti wawancara mendalam atau studi etnografis organisasi diperlukan untuk memperkuat validitas temuan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa korupsi sebagai bentuk fraud pada PT Pertamina tahun 2025 merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi faktor individu, organisasi, dan sistem yang saling berkaitan dan bersifat multidimensional dan sistemik. Fraud tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu seperti tekanan finansial dan rasionalisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan organisasi serta kompleksitas sistem regulasi yang saling berkaitan. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku koruptif dalam sektor publik tidak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor psikologis, kelembagaan, dan struktural. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa fraud di sektor publik tidak dapat dijelaskan hanya melalui perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan tata kelola organisasi dan sistem pengawasan yang belum berjalan secara efektif (Association of Certified Fraud Examiners [ACFE], 2022; Saikhu et al., 2025). Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Fraud Hexagon lebih relevan dibanding Fraud Triangle dalam menjelaskan karakter fraud modern yang bersifat kompleks dan terorganisasi (Vousinas, 2019). Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi, pengawasan independen, serta pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas sebagai langkah pencegahan korupsi di sektor publik. Penelitian ini juga menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan empiris secara langsung, seperti wawancara mendalam atau observasi organisasi, agar mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai dinamika fraud dalam lingkungan BUMN dan sektor publik lainnya.

Referensi

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2020). *Fraud Examination* (6th ed.). Cengage Learning.

- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Report to the Nations: Occupational Fraud 2022*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2020). Beyond the fraud triangle. *CPA Journal*.
- Free, C., & Murphy, P. R. (2021). The ties that bind: Organizational culture and fraud. *Accounting, Organizations and Society*, 89.
- Irma, A., & Myharto, W. S. (2026). Fraud triangle perspective on corruption in state-owned enterprises: Evidence from the PT Timah, Tbk case. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 1–13.
- Kassem, R., & Higson, A. (2020). The new fraud triangle model. *Journal of Emerging Trends in Economics*.
- Kohar, Y. P. (2024). Overview of fraud dynamics in government: Trends, causes, and mitigation strategies.
- Kurniawan, D., & Sari, N. (2025). Digitalisasi pengelolaan keuangan publik dan pencegahan fraud pada sektor pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 7(1), 45–58.
- Lee, M. (2026). *The role of internal control systems in preventing financial fraud in SMEs*. <https://www.researchgate.net/publication/401471174>
- Lokanan, M. (2022). Challenges in fraud detection in public sector organizations. *Journal of Financial Crime*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Nailufar, A. (2026). *Effectiveness of internal control systems and governance on fraud prevention*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Conflict of interest and corruption risk management in public institutions*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). *Government at a Glance 2025: Corruption Risk Management and Internal Audit*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2026). *Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026*.

-
- Prasetyo, H., & Wulandari, R. (2023). Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada BUMN di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 8(2), 120–133.
- Reuters. (2025). *Indonesia corruption case linked to state energy firm*.
- Rizaya, A., & Nurhazana. (2025). The influence of fraud triangle elements on indications of financial statement fraud in SOEs.
- Said, J., Alam, M. M., & Aziz, M. A. (2022). Internal control and fraud prevention. *Journal of Financial Crime*.
- Saikhu, S., Suhardjanto, D., Probohudono, A. N., & Widarjo, W. (2025). A systematic review of fraud: An overview of state-owned enterprises. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2518493.
- Setiawan, A., & Putri, D. (2024). Budaya organisasi dan risiko fraud pada sektor publik Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 33–47.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The SCORE model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications*. Sage Publications.
- Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2021). *Audit Internal: Konsep dan Praktik*. Gadjah Mada University Press.